

Materi Pembelajaran Kebijakan Pariwisata Minggu ke-1

1. Definisi dan Konsep Kebijakan Publik
2. Taksonomi atau Hierarki Kebijakan Publik Sektoral dan Regional
3. Tujuan Kebijakan Publik

Definisi dan Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan untuk memastikan hasilnya rasional. Kebijakan tak hanya dipergunakan di ranah pemerintahan, namun juga organisasi publik, swasta, dan bahkan individu untuk mencari jalan keluar terbaik dari suatu kendala.

Noeng Muhadjir (2000) mendefinisikan kebijakan sebagai upaya pemecahan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting, yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *by the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan berakar dari kumpulan konsep atau gagasan yang muncul akibat adalah suatu masalah terkait khalayak. Konsep atau gagasan tersebut dibuat untuk menyelesaikan dan meminimalisir sebaran dampak negatif masalah yang sebelumnya muncul.

Sementara itu, kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari kebijakan berupa program-program pencapaian tujuan dan cita-cita secara terarah; dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang terkait yang berhubungan erat dengan masyarakat madani.

Charles Edward Lindblom (1993) dalam publikasinya mengemukakan bahwa pembuatan kebijakan publik pada hakikatnya ialah proses politik yang sangat kompleks, analitis, dan tidak mengenal saat dimulai atau diakhirinya. Batas-batas dari proses tersebut bersifat tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks itu lantas disebut pembuatan kebijakan publik yang kemudian akan membuahkan hasil berupa sebuah kebijakan.

Menurut Joko Widodo (2002), di dalam praktiknya kebijakan publik yang baik harus mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi kepada sebuah tujuan tertentu.
- b. Sebuah kebijakan akan berisi tindakan atau pola tindakan dari pejabat pemerintah.
- c. Sebuah kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bukan sesuatu yang akan dilakukan.

- d. Sebuah kebijakan publik akan bersifat positif atau “merupakan pemerintah perihal suatu masalah tertentu”. Juga bersifat negatif atau “keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.
- e. Kebijakan publik yang bersifat positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu. Peraturan tersebut bersifat memaksa atau otoritatif.

Dengan demikian, meskipun dibuat dan diawasi oleh pemerintah, konsep kebijakan publik haruslah berpihak pada masyarakat. Sejalan dengan sifatnya yang otoriter, kebijakan publik bersifat memaksa. Dengan sifat tersebut, konsep dasar kebijakan publik wajib ditinjau secara berkala untuk memastikan produk-produk kebijakan yang dihasilkan senantiasa relevan dengan berbagai perkembangan yang terjadi.

Taksonomi atau Hierarki Kebijakan Publik Sektoral dan Regional

Bromley (1989: 32-33) mengidentifikasi tiga level kebijakan yakni; “*policy level, organizational level dan operational level*”. Pada masing-masing level ini kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk “*institutional arrangement*” (peraturan perundang-undangan) yang sesuai dengan tingkat hierarkinya.

Dalam suatu negara demokrasi “*policy level*” diperankan oleh cabang legislatif dan yudikatif, sedangkan “*organizational level*” diperankan oleh cabang eksekutif. Selanjutnya mengenai “*operational level*” akan didapati pada satuan pelaksana (operating units) dalam masyarakat, perusahaan-perusahaan dan rumah tangga-rumah tangga yang dari tindakan kesehariannya menghasilkan dampak yang dapat diamati.

Lembaga Administrasi Negara (1993: 3-7), membagi kebijakan publik ke dalam lingkup nasional dan ke dalam lingkup wilayah/daerah. Di setiap lingkup kebijakan publik tersebut terdapat kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis.

Dalam lingkup wilayah/daerah, bentuk-bentuk kebijakannya dikaitkan dengan penyelenggaraan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Level-level dan isi kebijakan tersebut akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola-pola interaksi (*pattern of interactions*) kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Pola interaksi ini selanjutnya mempengaruhi “*outcome*”, yakni hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut.

Taksonomi kebijakan publik sektoral adalah cara mengklasifikasikan kebijakan publik berdasarkan sektor-sektor yang menjadi fokus kebijakan tersebut. Di Indonesia, kebijakan publik sering dikelompokkan menurut sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Sedangkan taksonomi kebijakan publik regional adalah kebijakan yang difokuskan pada kebutuhan dan karakteristik spesifik wilayah tertentu.

Contoh penerapan taksonomi kebijakan publik sektoral di Indonesia:

Kebijakan Ekonomi Kreatif	
Kebijakan	Pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Tujuan	Mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif seperti film, musik, desain, kuliner, dan teknologi digital.
Implementasi	Pelatihan bagi pelaku usaha kreatif, pemberian insentif, serta dukungan akses pasar dan teknologi.
Hasil	Pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional.

Tabel 1. Penerapan Taksonomi Kebijakan Publik di Indonesia

Contoh penerapan taksonomi kebijakan publik regional di Indonesia:

Kebijakan Otonomi Khusus di Papua	
Kebijakan	Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 dan perubahannya pada UU No. 2 Tahun 2021.
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan, serta menjaga kestabilan politik dan keamanan di wilayah tersebut.
Implementasi	Peningkatan alokasi dana otonomi khusus untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pelibatan lebih besar masyarakat asli Papua dalam pemerintahan.
Hasil	Pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan publik di wilayah Papua, meskipun tantangan dalam pemerataan pembangunan dan masalah sosial-politik masih ada.

Tabel 2. Penerapan Taksonomi Kebijakan Publik Regional di Indonesia

Tujuan Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik memiliki tujuan untuk mengatasi masalah publik. Sebab orientasi penciptaan kebijakan publik adalah tercapainya masyarakat yang sejahtera di bawah naungan kebijakan publik.

Irfan Islamy (2003:20) menguraikan:

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Tujuan kebijakan publik merupakan hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui tindakan dan regulasi yang dirancang untuk menangani masalah atau

memajukan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh tujuan kebijakan publik di berbagai sektor:

Kebijakan Publik	
Kebijakan "Merdeka Belajar"	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem yang lebih fleksibel dan mendukung kreativitas guru serta siswa. Hal ini bertujuan agar siswa lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial modern.
Program Keluarga Harapan (PKH)	Mengurangi jumlah penduduk miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga tidak mampu, khususnya yang memiliki anak usia sekolah atau anggota keluarga yang sakit.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Menjamin seluruh warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau atau gratis melalui asuransi kesehatan.
Pembangunan infrastruktur strategis melalui Proyek Strategis Nasional (PSN)	Memperkuat daya saing ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan internet. Ini akan memudahkan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan investasi.
Program Kartu Prakerja	Memberikan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha mandiri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, khususnya di kalangan anak muda.

Tabel 3. Beberapa Kebijakan Publik di Indonesia dan Tujuannya